

## Kajian Komparasi Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia

Hendra\*, Priazki Hajri

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi

\*Corresponding Author. e-mail: [hendra92@unja.ac.id](mailto:hendra92@unja.ac.id)

### Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk memberikan pemahaman kebangsaan, hak, dan kewajiban warga negara serta sebagai media pendidikan karakter kepada masyarakat. Implementasi pendidikan kewarganegaraan tiap-tiap negara berbeda-beda sesuai dinamika dan sejarah yang menyertainya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dinamika pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia sehingga terlihat pelaksanaan dan perbedaan pendidikan kewarganegaraan di kedua negara. Kedua negara di pilih berdasarkan pertimbangan bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang bertetangga dan sama-sama beretnis Melayu, namun memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Artikel ditulis menggunakan literature review. Hasil telaah menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan yakni sama-sama dipengaruhi oleh penjajah masing-masing, kondisi politik, dan kebijakan penguasa serta tujuan pendidikan kewarganegaraan. Sementara perbedaannya adalah substansi dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri.

**Kata kunci:** pendidikan kewarganegaraan, Indonesia, Malaysia

### Abstract

*Citizenship education serves to provide an understanding of nationality, the rights and obligations of citizens as well as a medium for character education to the community. The implementation of citizenship education in each country varies according to the dynamics and history that accompanies it. This article aims to examine and analyze the dynamics of citizenship education in Indonesia and Malaysia so that you can see the implementation and differences in citizenship education in the two countries. The two countries were chosen based on the consideration that Indonesia and Malaysia are neighboring country and both are ethnically Malay, but have different historical backgrounds. Articles are written using literature review. The results of the study show that citizenship education in Indonesia and Malaysia has similarities, namely that they were equally influenced by their respective occupiers, the political conditions and policies of the rulers as well as the aims of civics education. While the difference is the substance of citizenship education itself.*

**Keywords:** *citizenships education, Indonesia, Malaysia*

*Submitted: 20 Februari 2023; Revised: 8 Maret 2023; Accepted: 1 April 2023*



This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wadah yang sangat vital dalam memberikan pemahaman kebangsaan bagi masyarakat suatu negara. Hal ini dikarenakan secara substantif, materi kewarganegaraan berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, menanamkan disiplin sosial dan menumbuhkan komitmen untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan (Sari, 2018). Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban, hubungan dengan negara, serta konsep kebangsaan yang muaranya adalah menjadi warga Negara berkarakter yang paham akan hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat, maupun Negara.

Menurut Akbal (2016), pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya menitikberatkan pada pembentukan manusia yang religius, demokratis, cerdas, terampil, dan sejahtera, menjadi pribadi yang mencintai serta mampu menjaga nama baik martabat bangsa dan negara. Sementara itu menurut Fadilah (2018), sebagai ujung tombak dalam pembangunan bangsa, tujuan pendidikan kewarganegaraan bukan hanya untuk mendidik warga negara menjadi *goodcitizenship*, dengan memahami hak dan kewajiban, tetapi juga untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan individu warga negara agar paham dengan politik sehingga ikut berpartisipasi dalam sistem politik sebagai perwujudan sistem demokrasi. Keseluruhan tujuan tersebut di atas merupakan modal untuk ikut berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang baik dalam menjaga harkat dan martabat bangsa di mata dunia. Mengingat esensi pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara yang baik, maka pendidikan kewarganegaraan menjadi kurikulum yang penting di banyak negara.

Lahirnya pendidikan kewarganegaraan tidak terlepas dari perkembangan dan sejarah dari suatu negara. Hal ini karena pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh latar belakang suatu bangsa (Tarmizi bin Anwar, 2019). Dinamika yang terjadi berpengaruh terhadap muatan yang terinternalisasi dalam materi kurikulum sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara tersebut. Amerika Serikat menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai media untuk memastikan golongan imigran merasa menjadi bagian dari Amerika sepenuhnya. Sementara di bagian Asia Timur, Jepang menjadikan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun kembali bangsa Jepang yang kalah dalam perang dunia II dengan berorientasi pada pengalaman, pengetahuan dan kemampuan (Moeis, 2017).

Indonesia mengalami pasang surut perubahan sistem pendidikan sejak era kolonialisme. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, hanya kaum bangsawan yang dapat mengenyam pendidikan karena adanya sistem kasta dalam pendidikan masa itu. Kemudian di masa pendudukan Jepang, sistem kasta dihilangkan sehingga kaum menengah ke bawah bisa mengecap pendidikan (Ramadhani, 2021). Meski Jepang menerapkan kurikulum yang mencampurkan kurikulum Jepang dengan kurikulum lokal, pendidikan diarahkan untuk mengaplikasikan *Nipponize* dan membentuk masyarakat yang siap membela Jepang dalam perang dunia II. Kurikulum yang di susun Jepang terkesan hanya untuk memobilisasi masyarakat Indonesia untuk kepentingan perang (Perdana, 2011). Adanya program Jepangisasi memang tak berlangsung lama, karena dalam tiga setengah tahun Jepang menyerah kalah dalam perang dunia II.

Pendidikan kewarganegaraan pada era pasca kolonialisme pun mengalami fluktuasi dan berkembang semakin kompleks dan dinamis. Pada awal kemerdekaan, upaya untuk membangun karakter tercermin dari konsep pembangunan mental (lebih dikenal dengan pembangunan karakter bangsa) yang dikemukakan oleh Soekarno untuk membangkitkan mental bangsa yang merasa masih rendah akibat penjajahan (Ridhuan, 2018). Konsep ini di pandang penting untuk membangkitkan jiwa nasionalisme dalam rangka membangun negara yang berdaulat. Selain itu, melalui konsep ini juga nilai-nilai karakter ditanamkan kepada masyarakat. Di era globalisasi yang tak terbendung sekarang, urgensi pendidikan kewarganegaraan makin terasa untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan menjadi warga negara yang baik sehingga perlu dipelajari oleh generasi muda (Widiatmaka, 2022).

Lain di Indonesia, lain pula di Malaysia. Malaysia dikenal sebagai salah satu negara yang multi etnik. Latar belakang Malaysia sebagai negara dengan masyarakat majemuk sudah berlangsung

sejak era kolonialisme Inggris. Ada tiga etnis utama yang mendiami Malaysia, yakni Melayu, China, dan India. Untuk mempersatukan berbagai etnis yang ada maka tak heran salah satu tujuan nasional adalah persatuan dengan semua kebijakan pendidikan terinternalisasi tujuan tersebut (Nordin, dkk, 2013). Dengan latar belakang Malaysia sebagai negara yang pluralistik, pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

Cikal bakal muatan kewarganegaraan di Malaysia sudah muncul di era pemerintahan kolonial Inggris dengan terwadahi dalam pendidikan moral yakni dalam bentuk pemberian pelajaran alkitab yang diberikan kepada murid beragama Kristen. Sedangkan, untuk murid yang non-Kristen diberikan pelajaran etika dengan penekanan bagaimana menjadi seseorang yang baik (Sumintono, dkk, 2012). Pendidikan kewarganegaraan secara resmi dimulai pada tahun 1972 dengan nama Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK). Kurikulum Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan di Malaysia bermuatan nilai-nilai multikulturalisme dan nasionalisme sebagai upaya untuk memelihara persatuan dalam keberagaman yang ada dalam masyarakat. Meskipun demikian, dalam implementasinya pendidikan sivik dan kewarganegaraan sering dianggap kurang penting karena tekanan dari mata pelajaran lain (Balakrishnan, 2015). Padahal secara hakikat, pendidikan sivik dan kewarganegaraan sangat urgen dalam masyarakat yang multikultural dalam menjaga persatuan.

Artikel ini membahas sejarah dan dinamika pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia. Pendidikan Kewarganegaraan di dua negara bertetangga dan beretnis Melayu ini tidak lepas dari sejarah panjang keduanya. Baik Indonesia maupun Malaysia juga sama-sama mengalami masa kolonialisasi. Indonesia sempat dijajah berabad-abad lamanya oleh Belanda sebelum memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sementara, Malaysia melepaskan diri dari cengkeraman Inggris pada 31 Agustus 1957. Melihat waktu kolonialisasi yang berlangsung lama, sistem pendidikan yang dijalankan oleh kedua negara tentu berkaitan dengan latar belakang tersebut. Selain itu, perkembangan politik suatu negara juga berpengaruh dalam perkembangan pendidikan kewarganegaraan (Winarno, dkk, 2020).

Perbandingan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia dilakukan dengan tujuan untuk melihat dan mengkomparasikan sejarah dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan di kedua negara. Menurut Qurtubi (2020), perbandingan pendidikan merupakan studi yang bertugas membandingkan teori dan praktik pendidikan di beberapa negara untuk memperluas pandangan di luar batas negara itu sendiri. Selain itu menurut Syakhrani, dkk (2022), perbandingan pendidikan dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *comparable* (layak dibandingkan), setaraf, dan relevansi aspek perbandingan. Dengan demikian, maka akan terlihat persamaan dan perbedaan pendidikan kewarganegaraan di kedua negara.

Hal inilah yang menjadi dasar perbandingan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika implementasi pendidikan kewarganegaraan di kedua negara. Dengan berfokus pada komparasi pendidikan kewarganegaraan di dua negara ini, maka akan terlihat bagaimana persamaan dan perbedaan serta keadaban dan kultur kewarganegaraan pada negara-negara yang beretnis sama dipengaruhi oleh kondisi historis yang berbeda (Fauziah, 2019). Selain itu, sejauh penelusuran penulis, belum ada perbandingan pendidikan kewarganegaraan antara Indonesia dan Malaysia sehingga perlunya dilakukan penelitian ini untuk melengkapi penelitian yang sudah ada tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini ditulis dengan menggunakan literature review. Literatur review merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya terdahulu secara sistematis dan eksplisit (Ulhaq, 2020). Karya-karya terdahulu yang dikumpulkan dan di analisis berupa jurnal-jurnal nasional dan internasional. Analisis isi dibatasi pada konsep dinamika dan sejarah pendidikan secara umum dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia secara khusus. Data yang dikumpulkan kemudian dipilih dan diklasifikasikan sesuai kebutuhan untuk dianalisis. Data yang diperoleh berupa perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia kemudian dikomparasikan sehingga menghasilkan analisis pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di kedua negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Pendidikan kewarganegaraan di sudah berkembang sejak era kolonial. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pendidikan kewarganegaraan di kenal dengan istilah *Burgerkunde*. Pembelajaran pada masa itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat patuh kepada pemerintahan Hindia Belanda dan tidak menganggap Belanda sebagai musuh dengan pengenalan akan hak dan kewajiban terhadap Hindia Belanda (Kurniawan, 2018). Dengan demikian, rakyat Indonesia dapat mendukung penuh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pada masa kolonial Jepang, sistem pendidikan versi Hindia Belanda dihapus. Sistem pendidikan tanpa kasta diterapkan agar semua kalangan bisa merasakan pendidikan. Namun tak berapa lama kemudian, Jepang mengarahkan pendidikan untuk menanamkan ajaran *Hakko Ichiu* sehingga misi *Nipponize* berhasil (Ramadhani, 2021). Sistem pendidikan yang diterapkan oleh Jepang terkesan untuk menarik simpati masyarakat agar mau membela Jepang dalam Perang Dunia.

Cikal bakal pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan dapat di lihat pada tahun 1947 ketika dalam kurikulum “Rentjana Pelajaran” Sekolah Rakyat sudah ada tujuan untuk membentuk dan membangun warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius, namun tujuan ini belum terwadahi dalam mata pelajaran khusus dengan nama pendidikan kewarganegaraan dan sejenisnya (Widiatmaka, 2021). Muatan ini diwadahi dalam Budi Pekerti (kelas 1 s/d 4) dan Pendidikan Agama (kelas 4 s/d 6). Menurut Alhamuddin (2014), kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka masih meniru rencana pembelajaran yang ada di masa kolonial.

Pendidikan kewarganegaraan secara nomenklatur baru muncul sepuluh tahun kemudian (1957) dengan nama Kewarganegaraan. Mata pelajaran kewarganegaraan diperkenalkan bersamaan dengan mata pelajaran tata negara dan tata hukum yang membahas tentang negara. Pada awal kemunculannya, kewarganegaraan hanya bermuatan hak dan kewajiban warga negara serta cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.

Hanya berselang dua tahun, mata pelajaran *Civics* diperkenalkan sebagai pengganti kewarganegaraan pada tahun 1959. Perubahan terjadi sebagai respon perubahan arah politik negara Indonesia waktu itu dimana UUD 1945 diberlakukan kembali untuk menggantikan UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950. Adapun materi yang wajib diajarkan adalah Sejarah Nasional, Sejarah Proklamasi, UUD 1945, Pancasila, dan Pidato-pidato Kenegaraan Presiden (Machful Indra Kurniawan, 2018). Metode pembelajaran di masa ini cenderung bersifat indoktrinasi. Hal ini tercermin dari buku yang dijadikan pegangan, yakni “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi” yang berisikan: 1) lahirnya Pancasila; 2) UUD 1945; 3) manifesto politik; 4) pidato presiden tanggal 17 Agustus 1960 (Penemuan Kembali Revolusi Kita); 5) pidato presiden di depan PBB tanggal 30 September 1960 (*The World A New*); 6) Manipol-usdek (manifesto politik dan UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia).

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1962, *Civics* berganti nama menjadi Kewargaan Negara. Penggantian nomenklatur ini merupakan anjuran dari Dr. Sahardjo, S.H yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dengan dasar tujuan yang ingin diwujudkan, yaitu membentuk warga negara yang baik (Kurniawan, 2018). Namun perubahan politik yang terjadi akibat peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965 dan diikuti peristiwa penyerahan surat perintah 11 Maret 1966 oleh Soekarno kepada Soeharto berdampak pula pada kebijakan pendidikan termasuk kewargaan negara.

Pada tahun 1968 diperkenalkan kurikulum baru yang di kenal dengan nama Kurikulum 1968. Kurikulum ini menekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama (Alhamuddin, 2014). Materi pendidikan kewarganegaraan yang ada di masa orde lama dianggap sudah tidak relevan oleh orde baru. Sebagai gantinya, pada kurikulum 1968, diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang mempelajari tentang: 1) Pancasila, 2) UUD 1945, 3) Ketetapan-Ketetapan MPRS 1966, 1967, dan 1968, termasuk GBHN, 4) Hak Asasi Manusia, dan 5) beberapa materi yang bermuatan sejarah, geografi, dan ekonomi (Sunarso, 2012).

Pembagian materi dalam berbagai jenjang pun terlihat lebih kompleks. Untuk tingkat SD, materi yang harus diajarkan yakni: 1) Pengetahuan Kewarganegaraan Negara, 2) Sejarah Indonesia, dan 3) Ilmu Bumi. Untuk tingkat SMP, materinya yakni: 1) Sejarah kebangsaan, 2) kejadian pasca kemerdekaan, 3) Pancasila, 4) UUD 1945, dan 5) Ketetapan MPR. Sementara untuk SMA, yakni uraian dari pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dihubungkan dengan sejarah, tata negara, ekonomi, dan ilmu bumi.

Pada tahun 1973, melalui GBHN 1973 pemerintah mulai menekankan tentang orientasi pendidikan kewarganegaraan yakni pembentukan warga negara yang Pancasilais. Melalui produk GBHN, pemerintah mengubah muatan dalam pendidikan kewarganegaraan negara dari kurikulum 1968 menjadi bermuatan nilai-nilai dalam sila Pancasila serta pesan-pesan tentang pembangunan Indonesia (Samsuri, 2012). Sebutan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) digaungkan sebagai pengganti Pendidikan Kewarganegaraan pada kurikulum 1975. Selain itu, melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, maka materi mata pelajaran PMP juga didominasi oleh materi P-4 sehingga bisa dikatakan bahwa P-4 menjadi arah atau pedoman warga negara Indonesia dalam bertingkah laku.

Materi P-4 tetap dipertahankan sebagai bagian dari PMP pada kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dengan penyempurnaan pada tujuan pembelajaran pada aspek afektif, kognitif dan psikomotor. PMP sebagaimana difungsikan sebagai pendidikan karakter bangsa masih diajarkan dengan berkesinambungan aspek kognitif. Padahal, dimensi PPKn sangat luas tidak hanya terbatas pada dimensi moral saja (Widiatmaka, 2021).

Melalui Kurikulum 1994 sebagai salah satu wujud perbaikan sistem pendidikan dan implementasi UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional (SPN) diperkenalkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai integrasi pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang muncul dalam UU SPN tersebut. Berdasarkan fungsi tersebut, maka fungsi yang dijalankan oleh PPKn tidak hanya sebatas pendidikan moral saja (menanamkan nilai-nilai karakter), namun juga sebagai pendidikan politik (membina kesadaran warga negara terhadap sesama dan negaranya).

Di era reformasi sekarang, pendidikan kewarganegaraan bahkan memiliki perkembangan paradigma baru yang sangat kompleks. Pendidikan kewarganegaraan dituntut harus memiliki struktur keilmuan yang kuat agar dapat menjadi wahana mencapai tujuan yang digariskan oleh pemerintah. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan nasional, yakni:

*“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.*

Poin penting dari UU Sisdiknas ini yakni pendidikan secara umum berfokus pada pembentukan kepribadian manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia selain sebagai transfer ilmu (Hendra, dkk, 2019). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan di masa ini untuk mendukung dan mewujudkan fungsi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Menurut Sunarso (2009), visi dari PPKn di era reformasi yakni meningkatkan kompetensi siswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, menjadi pelajaran wajib disemua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi).

Menurut Alfiansyah, dkk (2018), warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis harus memiliki *civic competences* seperti yang dikemukakan oleh Bronson yaitu *civic disposition* (karakter kewarganegaraan), *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) dan *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan). Oleh karena itu, tiga konsep *civic competences* ini wajib dimiliki untuk mewujudkan *good citizenship* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang paham akan hak dan kewajibannya.

Dalam Kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan mengalami penguatan secara metodologi, dimana penekanannya diarahkan tidak hanya dalam aspek afektif dan kognitif, namun juga mengembangkan aspek psikomotor. Hal ini sejalan dengan tujuan kurikulum 2013 menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Nomenklatur PPKn pun kembali digunakan dalam pembelajaran. Posisi PPKn makin disempurnakan dengan adanya Kurikulum 2020 yang dikenal dengan nama Merdeka Belajar. Kurikulum yang di gagas oleh Mendikbud ini memiliki tiga gagasan utama, yakni: 1) teknologi untuk akselerasi, 2) keberagaman sebagai esensi, dan 3) profil pelajar Pancasila (Raharjo, 2020). Secara substansi, keberagaman dan profil pelajar Pancasila jelas berkaitan dengan PPKn. Internalisasi nilai-nilai keberagaman dan kearifan lokal diinternalisasikan dalam pembelajaran untuk menghasilkan pelajar Pancasila yang mempunyai profil bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global dan berakhlak mulia.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bagaimana dinamika pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara substansi, pendidikan kewarganegaraan sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan, pendidikan kewarganegaraan mengalami perkembangan yang cukup dinamis dan selalu dipengaruhi oleh pemerintahan yang berkuasa. Hal ini sebagaimana menurut Sunarso (2009), bahwa perkembangan kewarganegaraan tidak terlepas dari pengaruh dan kepentingan politik penguasa. Hal tersebut tersebut juga dipengaruhi oleh kebutuhan zaman sehingga tuntutan dalam pendidikan kewarganegaraan selalu dinamis tanpa menghilangkan makna substantif dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri.

#### **Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Malaysia**

Malaysia dikenal sebagai salah satu negara multi-etnik. Ada tiga etnik besar yang menghuni Malaysia, yakni Melayu, China dan India. Adapun komposisinya adalah 50,4 % etnis Melayu, 23,7% China, 7,1% India, 11% masyarakat adat dan 7,8% etnis lainnya (Noor & Leong, 2013). Tiga etnis besar ini ditambah dengan etnis lainnya membaaur dan menjadikan Malaysia negara yang plural. Menurut Sari (2018), keberagaman etnis ini sudah muncul pada pertengahan abad 19 ketika orang China masuk ke Malaysia di susul oleh orang India pada akhir abad 19. Tak heran, semangat pendidikan di Malaysia diwarnai oleh semangat persatuan dalam keberagaman.

Sejarah pendidikan di Malaysia berkaitan erat dengan Inggris. Inggris menerapkan pendidikan dengan sistem "*Divide and Rule*" untuk menebalkan semangat kedaerahan di kalangan rakyat. Mereka memandang pendidikan tidak begitu penting kepada penduduk Malaysia dan dikhawatirkan akan menimbulkan semangat nasionalisme untuk menentang kekuasaan Inggris saat itu (Shahril, 2009). Namun atas desakan sultan dan pembesar Melayu, Pemerintah kolonial akhirnya menyediakan pendidikan namun hanya pendidikan rendah saja dan diarahkan untuk keperluan tenaga kerja Inggris.

Dalam perkembangannya, untuk mengakomodir keberagaman, pemerintah kolonial Inggris membentuk dasar pendidikan kebangsaan dengan mengembangkan lima sekolah, yakni: 1) sekolah agama Islam, 2) sekolah Vernakular Melayu, 3) sekolah Vernakular Inggris, 4) sekolah Vernakular China, dan 5) sekolah Vernakular Tamil (Shufiyati, 2012). Sekolah yang didirikan oleh Inggris mengakomodasi berbagai etnis yang ada di Malaysia. Menurut Bajunid dalam Sumintono, dkk (2012), pemerintah kolonial Inggris mulai membuka pendidikan formal di Malaysia pada tahun 1816 ditandai dengan berdirinya Penang Free School di Penang.

Setelah kemerdekaan tahun 1957, pendidikan di Malaysia memiliki 3 tujuan dasar. Pertama, untuk mewujudkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Kedua, untuk menghasilkan pelajar yang berdisiplin serta mematuhi dan menghormati kedua ibu bapak mereka dan pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang cakap dan efisien. Ketiga, memastikan agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan khususnya dalam menentukan perkembangan sistem pendidikan yang progresif dan bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama (Syakhrani, dkk, 2022). Dalam rangka pembangunan bangsa, pemerintah Malaysia berfokus pada pengembangan sistem pendidikan nasional yang dapat menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat. Salah satu tujuan dari Kebijakan Pendidikan Nasional Malaysia adalah "untuk menanamkan dan memelihara kesadaran nasional melalui pengembangan cita-cita, nilai, aspirasi dan

kesetiaan umum untuk dibentuk persatuan nasional dan identitas nasional dalam masyarakat multirasial” (Daud, 2016).

Salah satu kurikulum yang diajarkan adalah pendidikan moral. Lahirnya pendidikan kewarganegaraan di Malaysia awalnya tidak terlepas dari adanya pendidikan moral. Pada masa pemerintahan kolonial Inggris, pendidikan moral diberikan dalam bentuk pengajaran alkitab yang diberikan kepada murid beragama Kristen. Sementara itu, untuk murid yang non-Kristen diberikan pelajaran etika dengan penekanan bagaimana menjadi seseorang yang baik (Sumintono, dkk, 2012). Setelah Malaysia memproklamasikan kemerdekaan pada 31 Agustus 1957, agama resmi Malaysia yakni Islam. Sebagai konsekuensi, pendidikan moral yang awalnya berupa pengajaran kitab berubah menjadi pengajaran Islam yang diberikan kepada murid beragama Islam. Sementara itu untuk murid yang beragama selain Islam diperkenalkan pelajaran moral dalam pembelajaran di kelas.

Pendidikan kewarganegaraan akhirnya diperkenalkan pada tahun 1972 dengan nama Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK). Pada awalnya muatan PSK bertolak pada muatan jenis dan struktur kerajaan. PSK dijadikan sebagai pembelajaran wajib dalam upaya menanamkan semangat cinta negara. Namun mata pelajaran ini sempat dihilangkan pada tahun 1982 karena tuntutan kemajuan sains dan teknologi yang mementingkan ilmu pengetahuan. Pendidikan Kewarganegaraan di Malaysia menjadi dianggap kurang penting karena kendala dan tekanan dari mata pelajaran lain (Balakrishnan, 2015). Padahal muatan pendidikan kewarganegaraan diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam konteks sosio-kultural Malaysia yang sangat plural.

Sebagaimana diketahui, Malaysia secara identitas merupakan negara yang pluralistik. Di satu sisi, keberagaman ini dapat dikatakan sebagai anugerah dengan adanya kekayaan kebudayaan yang berkembang. Namun di sisi lain keberagaman bisa menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses pembangunan bangsa Malaysia dengan multikulturalnya diarahkan pada solidaritas nasional untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan politik jangka panjang. Proses pembangunan bangsa dan identitas nasional ditujukan untuk membangun harmoni sosial untuk mewujudkan stabilitas demi pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Yusof, 2014).

Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka memperkuat persatuan bangsa melalui pendidikan, pemerintah Malaysia menetapkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) pada tahun 1988 yang dinyatakan sebagai tujuan pendidikan Malaysia yang tercantum dalam Akta Pendidikan 1996, yakni:

*“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”.*

Nilai-nilai yang ada dalam FPK ini merupakan kebutuhan mendesak Malaysia dalam upaya persatuan ras, stabilitas politik, kemajuan ekonomi dan sosial serta pembangunan manusia (Awang & Tayeb, 2022). Melihat tujuan yang ingin dicapai, maka salah satu sarana untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Apalagi pada era millenium, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa tantangan baru pada generasi muda. Para generasi muda dihadapkan pada ancaman berbagai isu mulai dari masalah sosial hingga degradasi nilai-nilai budaya yang terpengaruh oleh budaya luar. Dalam konteks Malaysia, keberagaman yang semakin kompleks dan hilangnya konsensus nilai membuat pengenalan hak dan kewajiban serta nilai-nilai menjadi hal yang urgen untuk dilakukan (Balakrishnan, 2015).

Untuk merespons hal ini, subjek Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan atau PSK diperkenalkan kembali pada tahun 2005. Penerapannya dilakukan secara bertahap mulai Kelas 4 Sekolah Dasar dan Kelas 1 Sekolah Menengah Pertama. Kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan di Malaysia bermuatan nilai-nilai nasionalisme dan multikulturalisme. Kurikulum ini melingkupi berbagai hal seperti perkembangan individu dan sosial, tanggung jawab sebagai

individu terhadap keluarga, partisipasi masyarakat, membangun hubungan yang baik, pengetahuan dan pemahaman terhadap keberagaman, penghormatan terhadap hak orang lain, kontribusi terhadap pembangunan nasional serta nilai-nilai kemandirian dan harga diri. Kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan juga berisikan muatan nilai-nilai yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang melek politik dan melek hukum (Sari, 2018).

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan di Malaysia juga diarahkan agar generasi muda, dalam hal ini siswa untuk memahami dan memiliki *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic values* (Balakrishnan, 2015). Hal ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Doganay (2012), bahwa kurikulum pendidikan kewarganegaraan harus mencakup nilai, sikap dan watak dalam pelaksanaannya. Sementara itu, dalam konteks sebagai negara multikultural, pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang masih berlandaskan pada penanaman cinta tanah air dan kesadaran bernegara menjadi salah satu muatan yang terinternalisasi dalam kurikulum. Sebab, dalam masyarakat yang multietnis, upaya untuk terus mencapai persatuan yang menyeluruh harus diutamakan.

### PEMBAHASAN

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia mengalami perkembangan yang dinamis dan menarik untuk dibandingkan. Perbandingan pendidikan merupakan studi yang berfokus untuk membandingkan teori dan praktik pendidikan di beberapa negara guna memperluas pandangan di luar batas negara tersebut (Qurtubi, 2022). Praktik pendidikan di berbagai negara tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah suatu negara. Menurut Yahya (2011), perbandingan pendidikan harus memperhatikan latar belakang sejarah suatu bangsa karena dianggap penting dan mempengaruhi pendidikan suatu negara. Selain itu, dalam melakukan perbandingan harus mengacu kepada prinsip komparasi, yakni *comparable* (layak dibandingkan), setaraf, dan relevansi aspek perbandingan (Syakhrani, dkk, 2022).

Mengacu pada berbagai konsep di atas, penulis merumuskan indikator dan beberapa temuan sebagai perbandingan dinamika dan implementasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia. Perbandingannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Komparasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia

No.	Aspek Perbandingan	Negara	
		Indonesia	Malaysia
1	Sejarah Pendidikan	Pada masa Hindia Belanda, sistem pendidikan dengan mengenal kasta. Dimasa Jepang di hapus. Kurikulum pertama setelah kemerdekaan: Rentjana Pelajaran.	Sudah ada sejak masa kolonial Inggris. Hanya saja masih pendidikan rendah dan diarahkan untuk keperluan tenaga kerja Inggris. Setelah kemerdekaan, berfokus pada pengembangan sistem pendidikan nasional yang dapat menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat.
2	Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan	Pada masa Hindia Belanda dinamai <i>Burgerkunde</i> . Tujuan pembelajaran agar masyarakat patuh kepada pemerintahan Hindia Belanda dan tidak mengangap Belanda sebagai musuh. Setelah kemerdekaan muncul dengan nama Kewarganegaraan pada 1957.	Berkaitan erat dengan pendidikan moral yang sudah ada sejak masa kolonial Inggris. Pendidikan kewarganegaraan di Malaysia diperkenalkan pada tahun 1972 dengan nama Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK) dengan muatan jenis dan struktur kerajaan.

No.	Aspek Perbandingan	Negara	
		Indonesia	Malaysia
3	Tujuan Pendidikan	Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (UU No. 20 Tahun 2003).	Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara (Akta Pendidikan 1996).
4	Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	Meningkatkan kompetensi siswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis (Sunarso, 2009), menanamkan nilai-nilai kebangsaan, menanamkan disiplin sosial dan menumbuhkan komitmen untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan (Sari, 2018)	Mengarah pada terciptanya warga negara yang melek politik dan melek hukum (Sari, 2018), agar generasi muda, dalam hal ini siswa memahami dan memiliki <i>civic knowledge</i> , <i>civic skill</i> , dan <i>civic values</i> (Balakrishnan, 2015).
5	Budaya Kewarganegaraan ( <i>Civic Culture</i> )	Budaya berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang didalamnya terkandung <i>civic virtue</i> (kebajikan kewarganegaraan) yang mencakup berbagai hal seperti peran aktif warga negara, semangat kemasyarakatan, dan lain-lain.	Fokus pada usaha untuk menanamkan kesadaran nasional melalui pengembangan cita-cita, nilai, aspirasi dan kesetiaan umum untuk dibentuk persatuan nasional dan identitas nasional dalam masyarakat yang pluralistik.

Tabel di atas menunjukkan beberapa hal mendasar pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia. Secara historis, sistem pendidikan di kedua negara memiliki persamaan yakni dipengaruhi oleh negara yang pernah menjajah keduanya. Perbedaannya terletak pada substansi pendidikan kewarganegaraan diawal kemunculannya. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia secara substantif sudah ada sejak masa Hindia Belanda, dengan nama *Burgerkunde* yang

intinya bertujuan agar masyarakat patuh kepada pemerintahan Hindia Belanda dan tidak menganggap Belanda sebagai musuh. Sedangkan di Malaysia sejarah awal pendidikan kewarganegaraan berasal dari pendidikan moral yang sudah diterapkan di era pemerintahan Inggris.

Latar belakang pendidikan kewarganegaraan di kedua negara pasca kemerdekaan juga menunjukkan perbedaan yang mendasar. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1957 dengan muatan terbatas pada materi hak dan kewajiban warga negara serta cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Malaysia baru menetapkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan tahun 1972 dengan materi berfokus pada jenis dan struktur kerajaan. Kemunculan pendidikan kewarganegaraan Indonesia yang lebih awal dipengaruhi oleh tuntutan adanya tujuan untuk membentuk dan membangun warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius, namun belum terwadahi dalam satu mata pelajaran khusus. Sementara itu, kemunculan pendidikan kewarganegaraan di awal tahun 1970-an adalah bentuk dari kelanjutan pendidikan moral yang pada masa kolonial dan awal kemerdekaan sarat akan nilai-nilai moral.

Perbedaan mendasar juga terlihat dari pengaruh kebijakan penguasa dalam mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan baik di Indonesia dan Malaysia. Dalam rentang 1957 sampai dengan sekarang, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sempat bergonta-ganti nomenklatur menyesuaikan dengan kebijakan dan substansi yang diinternalisasikan. Sementara Malaysia malah sempat menghilangkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebelum dimunculkan kembali pada tahun 2005. Kurikulum pendidikan Malaysia juga terinspirasi dari keberagaman etnis yang menghiasi negara Malaysia. Melalui pendidikan kewarganegaraan, generasi muda diharapkan mampu memahami keberadaan keragaman budaya, belajar untuk hidup dan menghargai keragaman tersebut dan memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai untuk menghargai perbedaan (Balakrishnan, 2015).

Budaya kewarganegaraan di kedua negara juga memiliki sedikit perbedaan, dimana pendidikan kewarganegaraan Indonesia saat ini berfokus pada pembentukan karakter melalui nilai-nilai Pancasila dengan menekankan peran aktif warga negara, semangat kemasyarakatan dan lain-lain. Sementara Malaysia menekankan persatuan nasional dan identitas nasional dalam masyarakat yang pluralistik. Meskipun demikian, tujuan pendidikan kewarganegaraan di kedua negara mempunyai irisan persamaan, yakni menciptakan warga negara yang berperan serta secara aktif melekat politik dan hukum dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa secara historis, pendidikan kewarganegaraan di kedua negara sama-sama dipengaruhi oleh sejarah kedua negara. Dalam hal ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang diterapkan oleh penjajah di kedua negara, meskipun secara substansi terlihat jelas bahwa Belanda menjalankan Burgerkunde dengan tujuan kepentingan Belanda sendiri, sementara pendidikan moral di Inggris kelak diejawantahkan oleh mata pelajaran lain yakni pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, kondisi politik dan kebijakan penguasa sama-sama berpengaruh pada perkembangan pendidikan kewarganegaraan di kedua negara bertetangga ini. Satu hal yang dapat ditarik, pendidikan kewarganegaraan di kedua negara sama-sama ingin mewujudkan warga negara yang aktif secara politik dan hukum dalam membangun negara masing-masing.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki urgensi masing-masing bagi kedua negara. Dinamika dan kompleksitas sosio-kultural cukup berpengaruh dalam perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia. Bahkan arah kebijakan dari penguasa turut mewarnai perubahan kurikulum sesuai dengan kebutuhan bangsa (Sunarso, 2009). Namun secara substansi, muatan pendidikan kewarganegaraan bermuara pada pembentukan pribadi warga negara sebagai *good citizenship*.

Menurut Winataputra (2003), inti dari kepribadian warga negara adalah *civic virtue* (kebijaksanaan kewarganegaraan), yang harus didukung oleh *civic disposition* (sikap kewarganegaraan), *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (keterampilan kewarganegaraan), *civic confidence* (kepercayaan diri kewarganegaraan), *civic commitment* (komitmen), dan *civic competence* (kecakapan kewarganegaraan). Mengingat pentingnya pengembangan aspek di atas, maka seyogyanya pendidikan kewarganegaraan menjadi penting di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan Malaysia.

## SIMPULAN

Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia terjadi secara dinamis sesuai dengan latar belakang sejarah negara tersebut. Persamaan dinamika pendidikan kewarganegaraan di kedua negara adalah sama-sama dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang dibawa dan diperkenalkan oleh Belanda dan Inggris sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia dan Malaysia. Selain itu pasca kemerdekaan, pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh kondisi politik dan kebijakan penguasa di Indonesia dan Malaysia. Indonesia sering berganti nomenklatur kewarganegaraan sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendidikan kewarganegaraan di Malaysia bahkan sempat dihilangkan karena dianggap tidak terlalu penting, kemudian dimunculkan lagi pada tahun 2005 dengan bermuatan multikulturalisme dan nasionalisme. Muara dari pendidikan kewarganegaraan kedua negara juga memiliki kesamaan yakni membentuk pribadi warga negara sebagai *good citizenship* yang aktif dalam membangun negara.

Perbedaan mendasar dari dinamika pendidikan kewarganegaraan keduanya adalah substansi pendidikan kewarganegaraan yang berbeda sedari awal kemunculan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. *Burgerkunde* sebagai cikal bakal pendidikan kewarganegaraan di Indonesia oleh Belanda dijadikan sebagai alat untuk menanamkan kepatuhan masyarakat kepada pemerintah Hindia Belanda, sementara pemerintah kolonial Inggris sedari awal menanamkan pembentukan nilai moral pada pendidikan moral sebelum kemudian pasca kemerdekaan diwadahi oleh pendidikan sivik dan kewarganegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2014). Pendidikan Sejarah di Malaysia Dewasa ini: Sejauh Manakah ia Relevan kepada Pembinaan Nasional? Susurgalur: *Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 2(1) Maret 2014.
- Alfiansyah, Rifki. H, dkk. (2018). Muatan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membelajarkan Civic Knowledge, Civic Skills, dan Civic Disposition di Sekolah Dasar. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 6, No. 2 Desember 2018 (185-194)
- Alhamuddin. (2014). Sejarah Kurikulum di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum). *Nur El-Islam*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014
- Awang, N. C. & Tayeb, A. (2022). Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Konsep Kewarganegaraan Inklusif: Antara Normatif dan Realiti Suatu Kajian Komprehensif. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* (e-ISSN : 2504-8562) 2022, Volume 7, Issue 5, e001500.
- Balakrishnan, V. (2015). *Rebirth of Civics and Citizenship Education in Malaysia*. Masalah Pendidikan Jilid 27, Oktober.
- Fadilah, F. (2018). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Isu Global (HAM) di Afrika Selatan dan Hong Kong. *Journal of Moral and Civic Education*, 2 (1) 2018 ISSN: 2549-8851 (online) 2580-412X (print). 8:15.
- Fauziah, F. (2019). Civic Education di Negara Korea Selatan dan Inggris. *Jurnal Foundasia*. ISSN 1412-2316. Vol X, No 2, September 2019 (64-78)
- Hendra, Indrawadi, J. & Montessori, M. (2019). Internalisasi Nilai Religius dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Daerah Tertinggal, *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (1): 84-94.
- Kurniawan, M. I. (2018). *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar*. Sidoarjo: UMSIDA Press.

- Moeis, I. (2017). *Pusparagam Pendidikan Kewarganegaraan di Berbagai Negara*. Yogyakarta: Gre Publishing
- Nordin, A. B., Alias, N., & Siraj, S. (2013). *National Integration in Multicultural School Setting In Malaysia*. *The Malaysian Online Journal of Educational Science*, Volume, 1(1), 20–29
- Perdana, N. A., & Magelang, S. M. A. N. (2011). Pengaruh Pendudukan Jepang Terhadap Masyarakat Magelang 1942-1945. *Paramita: Historical Studies Journal*, 20(2). 143- 157.
- Raharjo. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKn Progresif*, Vol. 15 No. 1 Juni 2020.
- Ramadhani, S. (2021). Sejarah Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan* Vol. 8 No. 1, Desember 2021, hal. 10-23
- Ridhuan, S. (2018). *Modul Pembelajaran 2 Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas Esa Unggul.
- Samsuri. (2012). Kurikulum Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan : Dari Politik Rezim ke Politik Negara untuk Membangun Warga Negara Ideal. *Makalah Seminar Nasional —Menyongsong Kurikulum Nasional*, 29 Oktober 2012.
- Sari, S. R. (2018). Peran Penting Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Multietnik Malaysia dan Singapura. *Journal of Moral and Civic Education*, 2 (2) 2018 ISSN: 2549-8851 (online) 2580-412X (print). 44:51.
- Shahril, Chairil Bin H. Marjuki. (2009). Dasar Dan Perancangan Pendidikan Negara Sejak 52 Tahun Kemerdekaan Malayasia: Satu Sorotan Dan Refleksi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 10, No. 2 Tahun 2009.
- Syakhrani, A.W., dkk. 2022. Perbandingan Pendidikan. *Educational Journal: General and Specific Research* Vol. 2 No. 3 Oktober 2022, page 419-432
- Shufiyati, E. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan di Malaysia. <https://www.slideshare.net/Eftandre/pendidikan-kewarganegaraan-di-malaysia> (diakses 17 Februari 2023).
- Sumintono, B. (2012). Pendidikan Moral di Malaysia: Tantangan dan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Tahun II, Nomor 1, Februari 2012. 14:22.
- Sunarso. (2009). Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim. *Humanika* Vol. 9 No. 1, Maret 2009, hal. 67-80.
- Sunarso. (2012). Kepentingan Politik Penguasa Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia. *Humanika* Vol. 12 No. 1, hal. 80-99.
- Syakhrani, AB, dkk. (2022). Sistem pendidikan Negara Malaysia. *Educatioanl Journal: General and Specific Research* Vol. 2 No. 2 Juni 2022, page 320-327.
- Tarmizi bin Anwar. (2019). *Alternative Civic Education In Malaysia: A Case Of Dap's Democratic School*. Tesis. Mahidol University.
- Widiatmaka, P. (2021). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Dalam Membangun Karakter Bangsa Peserta Didik. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1 Juni 2022
- Winarno. (2020). Gagasan Kewarganegaraan Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Humanika* Vol. 27 no 2, e-ISSN 2502-5783

Yusof, D. M., Zakaria. H., dan Shadan, A.(2014).*Higher Education And Civic Development In Malaysia. Proceedings of SOCIOINT14- International Conference on Social Sciences and Humanities*, 8-10 September 2014-Istanbul Turkey.